

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adji, Indriyanto Seno. *Korupsi dan Permasalahannya*. Jakarta: Media Press, 2012.
- Ali, Zaenudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Arba, H.M. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Dewata, Mukti Fajar Nur, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Hadjon, Philipus M., dan Tatiek Sri Djatmiati. *Argumentasi Hukum*. Cetakan ke 4. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020.
- Harahap, M Yahya. *PembahasanPermasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Harahap, Zairin. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*,. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ibrahim, Muhammad Buchori, Fifian Permata Sari, Lalu Puji Indra Kharisma, Indra Kertati, Putu Artawan, I Gede Iwan Sudipa, Peran Simanihuruk, Gusti Rusmayadi, Eko Nursanty, dan Enos Lolang. *Metode Penelitian Berbagai Bidang Keilmuan (Panduan & Referensi)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I: Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negar*. Jakarta: Sinar Harapan, 2004.
- Ishaq, Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Ismail, Nurhasan. *Hukum Pengurusan dan Pendaftaran Hak Atas Tanah: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Setara Press, 2024.
- Junaidi. *Pengantar Ilmu Hukum (Penormaan Aspek-aspek Hukum dalam Cita Hukum Indonesia)*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.

- Lubis, Muhammad Yamin, dan Abdul Rahim Lubis. *Hukum Pendaftaran Tanah*. Bandung: CV Mandar Maju, 2008.
- Mahmud, Ade. *Pengendalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Positif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Mamudji, Sri, Hang Rahardjo, Agus Supriyanto, Daly Erni, dan Dian Pudji Simatupang. *Metode penelitian dan penulisan hukum*, 2005.
- Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2011.
- Menggala, Hasan Basri, dan Sarjita. *Pembatalan dan Kebatalan Hak Atas Tanah*. Yogyakarta: Tugu Jogja, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*,. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Mertokusumo, Sudikno *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Mertokusumo, Sudikno *Penemuan Hukum (sebuah Pengantar)*. Ed. Kedua. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Vol. Cetakan I. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum acara pidana: suatu tinjauan khusus terhadap surat dakwaan, eksepsi, dan putusan peradilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Napitupulu, Diana RW. *Pendaftaran Tanah (Pensertipikatan Hak Atas Tanah dan Peralihannya)*. Jakarta: UKI Press, 2022.
- Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: PT. Tarsito, 2002.
- Otto, Jan Michiel. *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung: PT Refika Aditama, 2006.
- Pramono, Budi. *Sosiologi Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Radbruch, Gustav. *Tujuan Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press, 2006.

- Rasyid, Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ravena, Dey dan Kristian. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Saefullah, Encep. *Buku Ajar Hukum Bisnis*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2022.
- Sahnan. *Hukum Agraria Indonesia*. Malang: Setara Press, 2016.
- Salim, H.S. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012.
- Santoso, Urip. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Jakarta, Prenamedia Group*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Sasmitha, Tody, Haryo Budhiawan, dan Sukayadi Sukayadi. *Pemaknaan Hak Menguasai Negara Oleh Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, STPN, 2014.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Sitorus, Oloan, dan Dawinsyah Minim. *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah (Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi, Tesis, Disertasi)*. Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2003.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke-13. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia, 2003.
- Sumardjono, Maria S.W. *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta, 2014.
- Surachmin, dan Suhandi Cahaya. *Strategi Dan Teknik Korupsi Mengetahui Untuk Mencegah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Suratman, dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Cet.3. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Tehupeiory, Aartje. *Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah*. Jakarta: UKI Press, 2023.

Tolib Effendi, SH. *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*. Yogyakarta: MediaPressindo, 2018.

Wiyono, R. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Wiyono, R. *Pembahasan undang undang pemberantasan tindak pidana korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Yanuar, Purwaning M. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*. Bandung: PT Alumni, 2007.

B. Artikel Jurnal

Arifin, Firdaus. “Problematika Hukum Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku dan Ahli Warisnya.” *Pagaruyuang Law Journal* 3, no. 1 (2019): 64–85.

Febriana, Era Nandya, Jayus Jayus, dan Rosita Indrayati. “Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.” *e-Journal Lentera Hukum* 4, no. 2 (29 Agustus 2017): 131. <https://doi.org/10.19184/ejlh.v4i2.4782>.

Harun, Muhamad, dan Aditia Noegraha. “Harmonisasi Hukum Pengelolaan Barang Rampasan Negara Dalam Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak” 1, no. 2 (2023): 171–83.

Ibrahim, Muhamad Nur. “Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Keberatan Atas Putusan Pengadilan Dalam Perkara Korupsi” *e Jurnal Katalogis*, Volume 4 Nomor 5, Mei 2016 hlm 217-228.

Jaya, Arizon Mega. “Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal FH Unila Cepalo* Volume 1 Nomor 1, Juli-Desember 2017: hlm. 19-28 (2017). <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo>.

Kurniaji, Dinar Fiscusia. “Pendaftaran Hak atas Tanah Berdasarkan Putusan Pengadilan.” *FIat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 3 (3 April 2017). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.786>.

- Musta'in. "Implementasi Pendaftaran Sertipikat Hak Milik Atas Tanah." *Jurnal Akta* Vol.4, No.2 (2017). [.https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/1774/1316](https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/1774/1316).
- Prakarsa, Aliyth, dan Rena Yulia. "Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum PRIORIS* 6, no. 1 (15 Juni 2017). <https://doi.org/10.25105/prio.v6i1.1834>.
- Samosir, Tetti. "Efektifikasi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara." *ADIL: Jurnal Hukum* 6, no. 2 (16 Mei 2019): 182–97. <https://doi.org/10.33476/ajl.v6i2.821>.
- Saputro, Heri Joko, dan Tofik Yanuar Chandra. "Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran Dan Perampasan Asset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi." *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 2 (23 Agustus 2021): 273. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1033>.
- Thomas, Gloria. "Penggunaan Hak Prioritas Terhadap Pemegang Hak Guna Bangunan Yang Berakhir Jangka Waktunya," *Lex Privatum*, 22 Juli 2022.
- Widianugraha, Prama. "Tinjauan Normatif Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dikaitkan Pembentukan Aturan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 2 (11 Maret 2019): 208–23. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/144>.
- Widodo, Teddy. "Gugatan Pihak Ketiga Terhadap Eksekusi Barang Sitaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Magister hukum Udayana* Volume VII Nomor 2, Juli 2018 (Juli 2018): hlm. 242-243.

C. Internet

- Arizona, Yance. "Apa Itu Kepastian Hukum?" *YANCE ARIZONA* (blog), 13 April 2008. <https://yancearizona.wordpress.com/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> (diakses 3 Desember 2024).
- Harvard Law Review. "How Crime Pays: The Unconstitutionality of Modern Civil Asset Forfeiture as a Tool of Criminal Law Enforcement." *Harvard Law Review*, 8 Juni 2018. <https://harvardlawreview.org/print/vol-131/how-crime-pays-the-unconstitutionality-of-modern-civil-asset-forfeiture-as-a-tool-of-criminal-law-enforcement/>. (diakses 24 April 2025).
- Hukumonline, Tim. "Subjek Hukum: Pengertian, Kategori, dan Contohnya." *hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/subjek-hukum-lt62ece10f037ce/> (diakses 28 Maret 2025).

- Info Hukum. “Pengertian Badan Hukum , Syarat, Jenis Dan Tugasnya,” 25 Mei 2023. <https://fahum.umsu.ac.id/info/pengertian-badan-hukum-syarat-jenis-dan-tugasnya/> (diakses 25 Maret 2025).
- Kementerian ATR/BPN, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. “ATR/BPN: Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat.” . <https://ppid.atrbpn.go.id/joho/page/index>. (diakses 23 Maret 2025).
- Kementerian ATR/BPN. “Peta Interaktif BHUMI ATR/BPN.”. <https://bhumi.atrbpn.go.id/peta>. (diakses 23 Maret 2025).
- Komisi Pemberantasan Korupsi. “Kinerja 2020-2024: KPK Kembalikan Kerugian Negara Senilai Rp2,5 Triliun.”. <https://kpk.go.id/>. (diakses 28 Februari 2025).
- Naibaho, Rumondang. “Kejagung Nyatakan Telah Selamatkan Rp 24 T Uang Negara Sejak Januari 2024.” detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-7451946/kejagung-nyatakan-telah-selamatkan-rp-24-t-uang-negara-sejak-januari-2024>. (diakses 23 April 2025).
- Pahlevi, Antonius Alreza. “Mengenal Pembatalan Sertipikat Hak atas Tanah dan Prosedurnya.”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-pembatalan-sertipikat-hak-atas-tanah-dan-prosedurnya-lt5ee0668e6b036/>. (diakses 24 April 2025).
- Pramesti, Tri Jata Ayu. “Bolehkah Perampasan Aset Dilakukan Tanpa Ada Penyitaan Lebih Dulu? | Klinik Hukumonline,” 15 Juni 2017. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-perampasan-aset-dilakukan-tanpa-ada-penyitaan-lebih-dulu-lt56cefaf1c0089/>. (diakses 24 April 2025).
- Pratiwi, Febriana Sulistya. “Kupas Data: Kerugian Negara akibat Korupsi Tembus Rp230 Triliun dalam Sedekade?” Data Indonesia: Data Indonesia for Better Decision. Valid, Accurate, Relevant." . <https://dataindonesia.id/varia/detail/kupas-data-kerugian-negara-akibat-korupsi-tembus-rp230-triliun-dalam-sedekade>. (diakses 1 Maret 2025).
- Pusat Edukasi Antikorupsi. “KPK & Kementerian ATR/BPN Perkuat Efektivitas Pemulihan Aset Hasil Korupsi - ACLC KPK.”. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/informasi/20240918-kpk-kementerian-atrbpn-perkuat-efektivitas-pemulihan-aset-hasil-korupsi>. (diakses 28 Februari 2025).
- Putri, Vania Karunia Mulia. “Definisi Norma Hukum dan Ciri-cirinya.”. <https://www.kompas.com/skola/read/2023/04/25/090000469/definisi-norma-hukum-dan-ciri-cirinya>. (diakses 25 Maret 2025).

- Ristanto, Hengky. “Sertipikat PTSL Tak Sesuai Kondisi Riil - Radar Madiun.”
Sertipikat PTSL Tak Sesuai Kondisi Riil - Radar Madiun. Diakses 24
April 2025.
<https://radarmadiun.jawapos.com/ngawi/801223431/sertipikat-pts-l-tak-sesuai-kondisi-riil>. (diakses 24 April 2025).
- Sujatmiko, Bagus. “Kedudukan Sertipikat Tanah Sebagai Alat Bukti Dan
Perlindungan Hukumnya Terhadap Gugatan,”. https://pn-larantuka.go.id/main/images/artikel/1._artikel_1_pak_bagus.pdf.
(diakses 24 April 2025).
- Syafira, Zenitha. “Perampasan Aset Travel Umrah Bermasalah untuk Negara
Klinik Hukumonline”.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perampasan-aset-travel-umrah-bermasalah-untuk-negara-lt5dccc66c7e9f/>. (diakses 23 April 2025).
- U.S Department of Justice. “Asset Forfeiture Program | Types of Federal
Forfeiture,”. <https://www.justice.gov/afp/types-federal-forfeiture>.
(diakses 24 April 2025).
- Victoria, Agatha Olivia. “Kejagung: Negara rugi Rp310,61 triliun akibat dugaan
korupsi pada 2024.” Antara News, 31 Desember 2024.
<https://www.antaraneews.com/berita/4557990/kejagung-negara-rugi-rp31061-triliun-akibat-dugaan-korupsi-pada-2024>. (diakses 23 April 2025).
- Yaputra, Hendrik. “Jokowi Purnatugas, ICW Catat Kerugian Negara dari Kasus
Korupsi di Masa Jabatannya Capai Rp 290 Triliun | tempo.co.” Tempo,
20 Oktober 2024. <https://www.tempo.co/arsip/jokowi-purnatugas-icw-catat-kerugian-negara-dari-kasus-korupsi-di-masa-jabatannya-capai-rp-290-triliun-664524>. (diakses 23 April 2025).

D. Tesis

- Zulhisalis, Nanda. “Efektivitas Putusan Mahkamah Agung Tentang Pembatalan
Sertipikat Tanah dan Perlindungan Hukum Bagi Kepemilikan Tanah
Yayasan.” *Tesis*, Universitas Gadjah Mada, 2020.
- Nisar, Umy Umairah. “Hak Atas Tanah yang Digunakan sebagai Objek Hak
Tanggung yang Dirampas Negara dalam Perkara Tindak Pidana
Korupsi.” *Tesis*, Universitas Airlangga, 2017.